

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adnyani, N. K. S. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktik. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. ANDI.
- Ardiansyah, I. (2024). Penanggulangan tindak pidana korporasi. *Hawa dan AHWA.*
- Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Basuki, R., & Andriani, S. (2023). Penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif KUHP baru dan undang-undang sektoral. *Prenada Media. Concept of Crime. Deventer.*
- Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2011). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, J. (2018). Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Penerbit Hasbullah F. Sjawie. (2022). Penanggulangan tindak pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. *Gramedia.*
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Keraf, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Kompas.*
- Konsep KUHP Baru. *Kencana.*
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, M., & Priyatno, D. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi. *Kencana.*
- Muladi, M., & Priyatno, D. (2022). Penanggulangan tindak pidana korporasi. *Prenada Media*
- Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
- Mulyati, N. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi. *Rajagrafindo Persada.* Nugroho, D. (2021). Pidana korporasi dan lingkungan hidup. *Refika Aditama.*

- Pattiwael, J. J., & Hamidi, H. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 89–105. Prenada Media.
- Priyatno, D. (2022). Sistem penanggulangan tindak pidana korporasi dalam kebijakan legislasi. Prenada Media.
- Priyatno, D., & Kristian. (2021). Sistem penanggulangan tindak pidana korporasi: Ditinjau teori, yurisprudensi, konsep hakim. Prenada Media.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.
- PT RajaGrafindo Persada.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 211–224.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ratnasari, S. (2021). *Pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru*. Liberty.
- Roulinta, Y. S., et al. (2024). *Tindak pidana korporasi*. CV. Gita Lentera.
- Simons, J. (2013). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sirait, T. M. (2021). *Penanggulangan tindak pidana korporasi dari masa ke masa*. Deepublish.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Soekanto, S. (2002). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Sudarto. (1981). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, H. (2023). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi. PT Alumni.

Windari, R. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada

Wisnu, P. Y. (2023). Penanggulangan tindak pidana korporasi dan pemedanaan korporasi. Gramedia.

Artikel dalam Jurnal

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 140-148.

Agustin Sari, N. K. (2023). Criminal liability for corporate crime in Indonesia.

ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 867–874.

Amiruddin, M., & Asikin, Z. (2018). Penegakan hukum pidana lingkungan hidup Baruna, M. M., & Rahmat, D. 2024. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Bandung. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(1), 33-42.

Cahyani, G. T., Azzahra, N. M., & Hosnah, A. U. (2024). Analysis of the effectiveness of corporate criminal liability policies in preventing corruption in Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1).

Darmono. (2001). *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*. Jakarta: UI Press.

Dewa, R. C., & Tanudjaja, T. (2023). Tanggung jawab pidana pada korporasi dalam tindak pidana perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*.

Dewi, S. K. (2020). Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang. *Arena Hukum*, Universitas Brawijaya.

Emil Salim. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Faisal, A. (2019). Penanggulangan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana Gani, S. (2021). Pengaturan korporasi di Cipta Kerja dan lingkungan hidup. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3).

- Hariyono, D. A., Suarda, I. G. W., & Samosir, S. S. M. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi: Analisis UU Perbankan dan tanggung jawab bank atas kejahatan karyawan. *Jurnal Anti Korupsi*.
- Hartono, M. S. (2022). Fungsionalisasi hukum sebagai fondasi bangunan peradaban perguruan tinggi yang anti kekerasan seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 511-524.
- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Hasbullah, G. (2021). Penjatuhan sanksi korupsi dan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*.
- Jurnal Hukum Pro Justitia*, 27(1), 1–15.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Kriptut. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi dalam cyber pornografi. *Jurnal Cyber Hukum*.
- lingkungan hidup. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 135–150.
- Odum, E. P. (1993). *Basic Ecology*. Philadelphia: Saunders College Publishing.
- Panjaitan, R. M. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam kebocoran data pengguna. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Pattiwael, J. J., & Hamidi, H. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2).
- Pattiwael, J. J., & Hamidi, H. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam. *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2), 152–164.
- Peursen, C. A. van. (1985). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2021). Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. *USM Law Review*.
- Putra, I. K. A. A., Hartono, M. S., & Lasmawan, I. W. (2026). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Upaya Pemberantasan

- Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus BNN Provinsi Bali). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(06), 1958-1971.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum progresif dalam kejahatan lingkungan.
- Safitri, S. S., Setiawati, A. M. M., & Aprilinda, C. A. (2021). Menyoal penanggulangan tindak pidana dan alasan penghapus pidana korporasi terhadap tindak pidana korupsi dalam RKHUP. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1297–1318.
- Saputra, F. R., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No. 47/Pid.SusTPK/2019/PN SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 124–135.
- Soemarwoto, O. (1997). *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suteki. (2015). Desain hukum di ruang sosial. Thafa Media.
- terhadap korporasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 321–340.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Wijaya, A., & Boediningsih, W. (2021). Penanggulangan tindak pidana korporasi atas kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Yudiawan, I. D. G. H., & Ariestu, I. P. D. (2023). Juridical Review of Indonesia Broadcasting Commission Supervision on Broadcasting Services in Indonesia. In *ICLSSE 2023: Proceedings of the 5th International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2023, 1st June 2023, Singaraja, Bali, Indonesia* (p. 34). European Alliance for Innovation.
- Yudiawan, I. D. G. H., & Putra, I. K. T. A. (2021). Penerapan sanksi administratif kepada masyarakat berdasarkan peraturan gubernur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 728-735.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women and Children in the Perspective of Human Rights. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd*

International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2021, 09 September 2021, Singaraja, Bali, Indonesia (p. 185). European Alliance for Innovation.

Berita

DetikBali. (2022, Agustus 29). Adukan tumpahan batubara, warga Celukan Bawang datangi Gubernur Bali. Detik. <https://www.detik.com/bali/balibungah/d-6261046/adukan-tumpahan-batubara-warga-celukan-bawangdatangi-gubernur-bali>.

Skripsi dan Penelitian Terdahulu

Agustin, R. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup (Analisis putusan Nomor 893/Pid.Sus/2023/PN Srg). Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/81717/>

Pratama, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dumping limbah (Studi kasus putusan Nomor 991/Pid.B/2021/PN.Tjk). Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18066/>

Siregar, M. R. (2019). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup (Tinjauan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/3099/>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan MA No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Korporasi Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

